

LAPORAN KINERJA (LK)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

Jln. Besar Lima Puluh Simp. Dolok Km. 8 Pulau Sejuk
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Telp/Fax (0622) 96375–Kode Pos 21255



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara selaku pelaksana dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2023, hal ini sesuai dengan INPRES No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

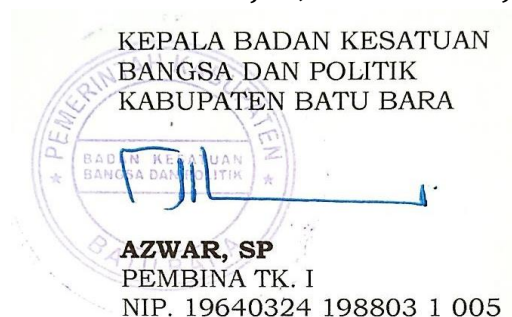
Dalam penyusunan Laporan Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara, yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara tahun 2019 - 2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini untuk masa yang akan datang.

Pulau Sejuk,

31 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA



AZWAR, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19640324 198803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Isu-isu Strategis	4
D. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	5
E. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...	7
A. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.....	7
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara Tahun 2019 - 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara;
- c. Meningkatkan kredibilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara terhadap Pemberi Amanah / Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara sebagai Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Batu Bara antara lain :

1. Menurunnya rasa satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat;
2. Seringnya terjadi konflik antar nelayan di perairan Kabupaten Batu Bara;
3. Antisipasi terhadap berkembangnya organisasi terlarang di masyarakat;
4. Menurunnya peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi termasuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan sosialisasi;
5. Pengaruh Budaya asing yang mengakibatkan pergeseran budaya asli dan berdampak negatif bagi budaya lokal. Hal ini diakibatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat;

6. Peran LSM/ORMAS dalam pembangunan sangatlah baik, maka dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan secara berkala untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

D. TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara adalah membantu Bupati Batu Bara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, maka Sistematisasi penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Review Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara Tahun 2023.

Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara selama tahun 2023 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019-2023.

Rencana Strategis tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023.

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BATU BARA

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara adalah dengan melakukan pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan

administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Kebijakan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Batu Bara Tahun 2019-2023 dalam Arah Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan ditujukan pada kelancaran penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, penataan aparatur, pengelolaan keuangan dan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan aparatur terkait. Kebijakan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- 2) Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi
- 3) Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kab. Batu Bara.
- 4) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana.



**Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

VISI : Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya			
MISI Ke-1 : Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi			
<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	<u>Sasaran 1.1</u> Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	<u>Strategi 1.1</u> Melakukan pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat <u>Strategi 1.2</u> Memberdayakan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Pemantau Perkembangan Politik, serta Parpol di Kabupaten Batu Bara untuk deteksi secara dini terhadap gejolak sosial, politik, ketertiban dan keamanan	<u>Kebijakan 1.1</u> Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan <u>Kebijakan 1.2</u> Menampung setiap informasi berkaitan dengan potensi konflik yang kemudian ditangani sehingga konflik tidak terjadi
<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	<u>Sasaran 1.1</u> Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	<u>Strategi 1.1</u> Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	<u>Kebijakan 1.1</u> Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kab. Batu Bara



	Sasaran 2.1 Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat	Strategi 1.2 Melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara	Kebijakan 1.2 Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang kehidupan politik demokratis Kebijakan 2.1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana
--	--	--	---

B. PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persentase	100
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan diverifikasi	Ormas	145
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5



4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB
---	--	---	-------	----

Untuk mendukung tercapainya target kinerja, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program kerja beserta anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2023, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.141.788.341	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.407.709.847	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	16.274.535.000	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	439.066.900	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	479.531.140	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.482.135.600	APBD
JUMLAH		24.224.766.828	APBD

Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya target kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, antara lain :



1. Penanganan Konflik Sosial di wilayah Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Batu Bara.
2. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kabupaten dan kecamatan.
3. Peningkatan Kerjasama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Batu Bara
4. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Batu Bara.
5. Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Batu Bara.
6. Peringatan Hari Lahir Pancasila.
7. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
8. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
9. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
10. Pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Batu Bara
11. Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar di Kabupaten Batu Bara.

Sedangkan faktor-faktor penghambat untuk mencapai target kinerja, antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran, sebagai berikut :



Sasaran 1:

Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persentase	100	100	100

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat diuraikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 8 (delapan) potensi konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara, antara lain :

Tabel 4. Data potensi konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	PERKEMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konflik antara Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus dengan PT. Perkebunan Socfindo Tanah Gambus.	Adanya klaim dari Kelompok Tani Perjuangan Desa Simpang Gambus yang dipimpin oleh an. Ruslan mengklaim bahwa telah terjadi kelebihan HGU PT. Socfindo Tanah Gambus sebanyak 667 Ha.	Akibat adanya klaim dari pengunjung rasa terkait kelebihan HGU, PT. Socfindo Tanah Gambus melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di kantor DPRD Sumut dan meminta DPRD Kabupaten Batu Bara yang diterima oleh Komisi 1 melakukan Pansus terkait adanya kelebihan HGU Perkebunan PT. Socfindo Tanah Gambus.



		Kelebihan HGU tersebut menurut Kelompok Tani terjadi di Desa Simpang Gambus sebanyak 472 Ha. di Desa Perkebunan Lima Puluh. Kelompok Tani Desa Perjuangan Simpang Gambus meminta kepada DPRD Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar pada saat perpanjangan HGU PT. Socfindo menurut Kelompok Tani tidak lagi dimasukkan ke dalam HGU.	Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib di Blok III dan Blok 9 Divisi 9 Perkebunan PT. Socfindo Tanah Gambus, Kelompok Tani yang telah usai melaksanakan aksi unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Batu Bara dan memasang plang dengan tulisan "ini tanah kami yang digarap PT. Socfindo tanah gambus sejak tahun 1970 sampai sekarang" sesuai RDP tanggal 5 September 2023 BPN Batu Bara menyatakan ada kelebihan HGU PT. Socfindo seluas 667 Ha.
2.	Aksi protes dari pedagang Pasar Delima yang mengatasnamakan (Tim Peduli Pasar Delima Indrapura/ TPPDI) yang belum mendapat pembagian kios	Adanya pedagang Pasar Delima yang belum mendapatkan kios di Pasar Delima. Renovasi Terhadap Pasar Delima Indrapura yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Batu Bara telah ditetapkan: 42 kios untuk pedagang 6 kios untuk	Pada hari Selasa tgl. 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Peduli Pedagang Pasar Delima Indrapura (TPPDI) melakukan aksi protes di pasar delima dikarenakan adanya pedagang yang telah mendapatkan kios dengan melakukan rehabilitas dengan cara menjebol dinding kios dengan tujuan menambah pintu kios sehingga dapat lebih luas dalam berjualan. Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Pasar Delima Indrapura telah terjadi aksi protes.



		fasilitas umum 24 kios yang belum dibagikan kepada pedagang. Bahwa pedagang merasa kecewa dikarenakan adanya dugaan Diskoperindag melakukan KKN terhadap pembagian kios sehingga ada pedagang yang memiliki 2 kios	
3.	Potensi kerawanan jelang Pemilu 2024 Calon presiden dan anggota legislative tidak memenuhi syarat pencalonan. Gugatan dari calon presiden dan anggota legislatif ke bawaslu yang tidak diterima syarat pencalonannya oleh KPU. Berkas persyaratan tidak lengkap hingga batas akhir yang diberikan KPU. Tahap pendaftaran/ penetapan calon melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga mengganggu tahapan berikutnya.		
4.	Masalah konflik tawuran di Kecamatan Tanjung Tiram yang banyak melibatkan anak sekolah dan remaja.	Tawuran yang meresahkan masyarakat setempat yang pemicunya	Aksi tawuran tersebut bisa diamankan oleh Danposal Tanjung Tiram dengan menjaga pos yang rawan tawuran antar geng kriminal.



		adalah narkoba jenis jenis sabu sabu.	
5.	Masalah harga beras naik dikarenakan harga pupuk naik dan harga pestisida yang naik.	Masyarakat banyak keberatan untuk harga beras yang terlalu tinggi dan masalah bantuan beras bulog yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang tidak mampu, malah banyak masyarakat yang mampu menerima beras bulog tersebut.	▪ Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan telah membuka pasar murah untuk membantu masyarakat. ▪ Bantuan beras bulog dari Dinas Sosial untuk masyarakat yang kurang mampu yang disalurkan di setiap desa yang ada di Kabuapten Batu Bara.
6.	Tingginya angka pemakaian narkoba di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara dari kalangan dewasa hingga remaja.	Akibat tingginya penggunaan narkoba bisa memicu tingginya tingkat kriminalitas dan tingkat pencurian yang relatif lebih besar di Kabupaten Batu Bara.	▪ BNN Kabupaten Batu Bara melakukan rehabilitasi untuk masyarakat yang sudah terkena narkoba. ▪ Polres sudah melakukan pemberantasan narkoba yang datang dari luar Kabupaten Batu Bara.
7.	Unjuk rasa Bapak Gomal Rajagukguk masalah uang yang dipakai oleh BUMD sebesar Rp. 800.054.000,-	Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak menanggapi masalah Bapak Gomal Rajagukguk dikarenakan masalah uang yang dipakai BUMD dimaksud terjadi pada masa jabatan Bupati	Bapak Gomal Rajagukguk meminta keadilan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan melakukan aksi unjuk rasa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

		OK Arya Zulkarnain.	
8.	Adanya kapal tanker dari luar menumpang berhenti di laut Kabupaten Batu Bara.	Kapal tanker yang berhenti di perbatasan Kabupaten Batu Bara mengganggu nelayan yang sedang mencari ikan dan merusak jaring nelayan di Kabupaten Batu Bara.	Pihak Danposal Tanjung Tiram langsung melakukan patroli dan langsung mengarahkan kapal tanker untuk bergerak lebih jauh ke tengah agar tidak mengganggu nelayan pencari ikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab Batu Bara, Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kab. Batu Bara, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Batu Bara, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Batu Bara beserta Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara secara bersama-sama melakukan penanganan terhadap potensi konflik yang muncul di wilayah Kabupaten Batu Bara, khususnya penanganan terhadap informasi potensi konflik secara cepat dan tepat.

Hasil yang kami peroleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah potensi konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi konflik}} \times 100 \\ &= \frac{8}{8} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



Sasaran 2 :

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945



Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Ormas	145	168	115,86

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, dapat diuraikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada indikator tersebut, jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan terverifikasi sampai tahun 2023 berjumlah 168 Ormas. Pada tahun 2022, Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar berjumlah 159 Ormas. Pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) Organisasi Kemasyarakatan yang mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.
2. Capaian pada indikator ini tergantung pada banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan keberadaan organisasinya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.



Sasaran 3 :

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	90,57	105,93

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara melalui aplikasi si Sukma terhadap pelayanan-pelayanan sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keterangan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan keberadaannya di Kabupaten Batu Bara.
2. Penerbitan Surat Rekomendasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi mahasiswa atau kelompok kerja lainnya.

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 3 (tiga) pelayanan di atas dengan nilai 90,57 dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai 85,50 dengan predikat Baik.

**Sasaran 4 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	BB (73,8)	100



Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara memperoleh nilai BB (73,8) dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai B.

Berikut disampaikan tabel capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.

**Tabel 5. Capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)				(10)	(11)			
1	Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Persentase peran aktif masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, Pilpres, Pilleg dan Pilkadaes	80%	-	80%	80%	-	80%	80%	70,66%	0%	0%	72,58%	-	88,32%	0%	0%	90,72%	-
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan Terverifikasi	145 Ormas	-	125 Ormas	130 Ormas	130 Ormas	140 Ormas	145 Ormas	106 Omas	119 Ormas	131 Ormas	159 Ormas	168 Ormas	84,80%	91,53%	100,77 %	113,57 %	115,86 %
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	-	82,25	83,50	85,25	85,25	85,50	85	85	85,14	84,63	90,57	103%	101%	99,87%	99,27%	105,93 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai.
3. Kerjasama dengan perangkat daerah lainnya, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
2. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal.
3. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
4. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan, sehingga belum optimalnya penyampaian informasi secara cepat mengenai potensi konflik yang terjadi di tingkat desa/kelurahan.

B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara dan realisasinya pada tahun 2023 sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.295.950.730,00	2.246.411.852,00	49.538.878,00
2	Belanja Hibah	17.362.500.000,00	7.962.500.000,00	9.400.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa	4.562.066.098,00	3.974.242.470,00	587.823.628,00
5	Belanja Modal	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
T O T A L		24.224.766.828,00	14.187.404.322,00	10.037.362.506,00



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara tahun 2019 - 2023, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas - tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Batu Bara Tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang direncanakan, sebagian besar berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya kinerja yang tidak mencapai dari target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

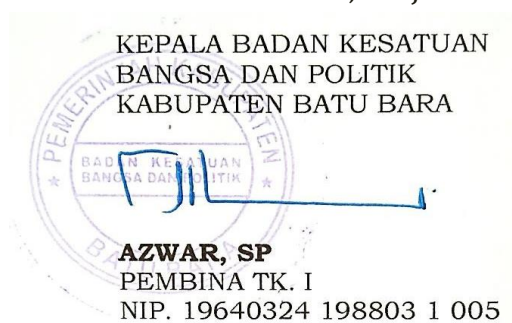


Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala / permasalahan. Permasalahan / kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Datuk Lima Puluh, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA



AZWAR, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19640324 198803 1 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AZWAR, SP**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BATU BARA**

AZWAR, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19640324 198803 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan	Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	Persentase	100
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik yang demokratis serta berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Ormas	145
3	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.141.788.341	PAPBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.407.709.847	PAPBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	16.274.535.000	PAPBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	439.066.900	PAPBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	479.531.140	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.482.135.600	PAPBD
JUMLAH		24.224.766.828	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua

BURATI BATU BARA

H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

AZWAR, SP
Pembina Tk. I
NIP. 19640324 198803 1 005